



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA DAN PEMBANGUNAN BUDAYA BANGSA

Orasi Kebudayaan Ketua DPR-RI

Disampaikan pada Asia Pacific Interfaith Youth Meeting
Di Universitas Islam Negeri Jakarta
Jakarta, 13 Oktober 2010

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kita kepada Allah *subhanahuwa wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memberikan kita berbagai kenikmatan, khususnya nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita berada pada acara *Asia Pacific Interfaith Youth Meeting*, yang diselenggarakan *Indonesian Youth Forum* di Jakarta.

Sungguh sebuah kehormatan bagi saya dapat berkesempatan bersama saudara-saudara untuk berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai kebudayaan Indonesia. Pemahaman terhadap Kebudayaan Indonesia dewasa ini menjadi penting, karena adanya berbagai permasalahan sosial dan budaya akhir-akhir ini, mengingat kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan, antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas budaya merupakan suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Hubungan ini, terus mengalami perubahan tata nilai akibat adanya interaksi antarbudaya dan bangsa dalam menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan ini.

Persoalan kebudayaan adalah persoalan kehidupan masyarakat, yang memiliki relasi atau hubungan tertentu, yang sering disebut sebagai struktur masyarakat (struktur sosial). Mengenai hubungan budaya dengan struktur, sampai sekarang masih menjadi polemik, apakah budaya bagian dari struktur, entitas yang terpisah, atau bahkan kebudayaanlah yang membentuk struktur sosial.

Tidak sedikit para budayawan mengkritik bahwa tersubordinasinya kebudayaan kedalam struktur, menyebabkan budaya dipakai sebagai alat untuk menunjang struktur sosial yang telah ditetapkan oleh suatu *grand design* politik tertentu. Hal ini menyebabkan kebudayaan tidak saja kehilangan otonominya, melainkan juga telah dimanipulasikan sedemikian rupa, sehingga menjadi sekadar alat legitimasi politik.

Hadirin yang saya hormati,

Kebudayaan "nasional Indonesia" adalah kebudayaan yang khas Indonesia, yang unik, dan dirasakan sebagai suasana yang menjadikan penduduk Indonesia berada dalam suasana saling memahami dan mengerti, serta merasa terikat pada struktur alam perasaaan dan pikiran yang relatif sejalan.

Pemahaman kebudayaan sebagai "warisan nenek moyang" hanya bisa berlaku pada kesatuan-kesatuan etnis saja, bukan pada bangsa yang sifatnya "multi-etnis", jadi yang bersifat multi-warisan nenek moyang.

Pemahaman kebudayaan "sebagai warisan nenek moyang" lebih baik dipakai oleh para *literati daerah* saja. Sedangkan, pemahaman kebudayaan sebagai "kreativitas estetik" akan dengan mudah menyebabkan kita tergelincir pada penyempitan pemahaman. Meskipun dinamika kebudayaan sangat tergantung pada kreativitas, tetapi pemahaman artistik dan estetik dengan mudah menjebak kita pada penyempitan makna kebudayaan menjadi "kesenian", betapapun mungkin banyaknya ragam perwujudan kesenian itu.

Dalam kebudayaan, kita dapat menemukan nilai estetik, yang akan menentukan corak dan bentuk kesenian, ada nilai kekuasaan, yang menentukan corak, sistem serta perilaku politik dan begitulah seterusnya. Corak sebuah kebudayaan, bisa dilihat dari konfigurasi nilai yang dimilikinya.

Kebudayaan nasional Indonesia adalah "puncak-puncak kebudayaan daerah," yaitu unsur-unsur kebudayaan daerah yang berhasil masuk ke dalam dan diterima sebagai bagian dari sistem makna "nasional", yang bersifat multi-daerah dan multi-etnis. Secara simbolik hal ini dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Disamping menyatakan bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa Indonesia, yang sesungguhnya merupakan bahasa utama daerah tertentu, tetapi juga mengatakan kesediaan menerima unsur-unsur daerah dalam suasana "komunitas" yang baru dibentuk yang bernama "bangsa Indonesia".

Jadi "bangsa Indonesia" lahir dari suasana kebudayaan yang bersifat supra-etnis dan multi-etnis. Pergerakan kebangsaan, dengan kehadiran berbagai partai politik serta organisasi yang bersifat supra-etnis, dan berbagai corak aktivitas kebudayaan, (seperti pers, film, sastra, dan teater) yang dengan sengaja melandaskan diri pada usaha pembentukan suatu suasana yang "nasional" dengan mengaburkan batas-batas daerah.

Oleh karena itu, kebudayaan nasional adalah merupakan hasil sumbangan daerah dalam proses pembentukan dan pertumbuhan komunitas-bangsa. Sehingga, penghormatan dan pemeliharaan kebudayaan daerah adalah pemelihara salah satu sumber dinamika kebudayaan nasional.

Dalam dinamika kebudayaan sebagai bagian dari proses *nation-building*, kebudayaan nasional terlibat dan seharusnya melibatkan diri dalam "peradaban dunia". Dalam kondisi ini, kebudayaan nasional melanjutkan proses memperkaya dirinya (*process of cultural enrichment*), dan memberi sumbangan bagi "peradaban dunia", agar tercapai sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: "Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial".

Jadi jika analogi "kebudayaan nasional" sebagai "aktor" dalam "peradaban dunia" diulang lagi, maka sang aktor yang bermain itu: "yaitu ia yang menerima dan berusaha memberi" adalah kebudayaan yang terbentuk dalam proses *nation-formation* dari sekian banyak ikatan etnis dan daerah dan yang telah semakin menginjak kedewasaan dalam proses *nation-building* yang penuh tantangan.

Pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal itu

diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.

Saudara-saudara sekalian,

Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru, harus dilakukan dengan cara membangun sebuah masyarakat sipil yang demokratis, dengan penegakkan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.

Bangunan Indonesia Baru itu adalah sebuah "**masyarakat multikultural Indonesia**" yang dibangun dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "**masyarakat majemuk**" (*plural society*). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* bukan lagi keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaannya, tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Dalam model multikulturalisme ini, masyarakat Indonesia dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum, dalam masyarakat tersebut coraknya seperti sebuah **mosaik, tidak ada yang disebut minoritas.**

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa, dalam "kebudayaan bangsa", sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Multikulturalisme menekankan **keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan**, sehingga akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Sebagai ideologi, **multikulturalisme harus diperjuangkan**, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia, yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya, akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam diskursus mengenai demokrasi, selalu diwarnai oleh pertanyaan mengenai legitimasi kekuasaan negara atas rakyat. Gagasan bahwa rakyat dapat menentukan kebijakan negara, yang kemudian dikenal dengan nama demokrasi, mulai lahir dengan bentuk yang masih sangat sederhana. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota di Yunani Kuno, merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara, yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Jika kita kembali pada konteks kebudayaan Indonesia, maka demokrasi yang dikembangkan adalah **demokrasi Pancasila**, yang menurut hemat saya telah terbukti sebagai *common platform* ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling tepat (*feasible*), cocok bagi kehidupan hari ini dan masa datang.

Sampai saat ini saya belum melihat alternatif *common platform* ideologis lain, yang tidak hanya dapat diterima (*acceptable*) bagi bangsa, tetapi juga cocok (*viable*) dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia. Dengan posisi Pancasila yang demikian krusial, saya melihat urgensi yang mendesak untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila.

Terdapat tiga hal yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, yaitu [1] negara yang dibentuk sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, [2] Falsafah dan Landasan

Ideologi Bangsa yaitu Pancasila, dan [3] Konstitusi Negara yang dijabarkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila, mungkin memang masih memerlukan pengembangan, pendalaman dan penjabaran konseptual, agar dapat menjadi sebuah paradigma yang andal. Pengembangan hingga penjabaran ini amat urgen, karena amat sukar membayangkan adanya Indonesia, yang dalam segala segi amat majemuk, tanpa dikaitkan dengan Pancasila.

Pancasila sesungguhnya adalah suatu faham yang berpendirian bahwa semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan. Sehingga kita harus memandang bahwa Pancasila bukan hanya merupakan ideologi negara, melainkan *vision of state* yang dimaksudkan untuk memberi andasan filosofis bersama, (*common philosophycal ground*), sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu Masyarakat Indonesia.

Namun demikian, perlu tetap diakui, bahwa sebagai landasan bermasyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, baik sebagai warga negara ataupun sebagai warga masyarakat, serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dewasa ini, penyaluran aspirasi politik masyarakat telah dapat diakomodasikan dalam sistem multi-partai. Pada satu sisi, hal ini dapat mencerminkan perwujudan demokrasi, akan tetapi pada sisi lain dapat mengarah pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila.

Faktor kemajemukan, serta adanya kesenjangan antar daerah yang makin tajam, dapat berdampak pada permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam. Keadaan negara yang berbentuk kepulauan dengan berbagai ragam permasalahan akan semakin berbahaya bila faktor luar ikut campur tangan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada.

Saudara-saudara Sekalian,

Perlu disadari bersama, bahwa perbedaan budaya bangsa Indonesia merupakan anugerah yang perlu disyukuri. Namun, perbedaan tersebut ternyata belum dikelola dengan baik, karena banyak klaim yang dilakukan pemerintah asing terhadap budaya Indonesia. Demikian pula dengan otonomi daerah, yang justru membuat kondisi sosial

kemasyarakatan kita rentan untuk bercerai berai. Hal ini harus segera disadari, sebab jika tidak ditemukan formula yang tepat untuk mengatasinya, sulit diharapkan kedaulatan bangsa ini beberapa tahun mendatang.

Pengaturan kepemilikan ekspresi budaya tradisional di dunia, memang belum diatur secara jelas. Kepemilikan terhadap suatu properti tertentu lebih mudah bila dikaitkan dengan konsep kekayaan intelektual, yang sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan konsep tentang dasar kepemilikan atas properti, tetapi hanya karena pengaturan kekayaan intelektual sudah lebih dulu ada dan mudah dalam proses penerapannya, karena hanya menyangkut satu individu saja.

Kepemilikan budaya, lebih tepat jika berdasar pada konsep kepemilikan kolektif bukan kepemilikan individu. Sehingga secara tegas dapat dikatakan, bahwa pengaturan kepemilikan atas ekspresi budaya yang didasarkan pada kepemilikan individu adalah tidak tepat dan menjadi salah kaprah apabila terus dilakukan.

Pengaturan kepemilikan ekspresi budaya tradisional di Indonesia, sebagaimana terefleksikan dalam pasal 10, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, pada kenyataannya tidak memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional.

Pada skala internasional isu tentang prosedur perlindungan ekspresi budaya tradisional sudah mulai ditangani serius oleh sebuah lembaga di bawah naungan PBB yang bertugas mengatur Kekayaan Intelektual dengan nama WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Draft Ketentuan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional WIPO ini memberi tantangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa yang sangat bhinneka dalam hal etnisitas dan kekayaan ekspresi budayanya.

WIPO mengatur bahwa pemilik ekspresi budaya tradisional diserahkan pada komunitas pemelihara dan pengembang ekspresi budaya tradisional. Ketentuan ini akan menghilangkan peran negara dalam realitas budaya nasional dengan mengkotak-kotakan penggiat budaya, yang dapat mengurangi terjadinya interaksi antar komunitas budaya, dan menimbulkan ketidakpedulian terhadap ekspresi budaya tradisional komunitas budaya lain. Hal ini tentu akan menimbulkan sikap ketidakpedulian yang cenderung akan mendorong sifat kedaerahan, dibanding sikap kebanggaan bersama sebagai satu bangsa.

Kebudayaan Indonesia dalam kancah globalisasi ini dapat dikatakan mempunyai dua sisi, kebudayaan Indonesia yang sangat beragam dan sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan terjadi universalisasi dalam negeri akibat globalisasi. Dengan demikian untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjadi pengikisan dan kepudaran serta kemusnahan warisan budaya Indonesia, diperlukan pengelolaan kebudayaan secara dinamis.

Saudara-saudara sekalian,

Pada kesempatan ini, saya mengingatkan kembali Pidato Kenegaraan Presiden di depan Sidang Paripurna DPR 14 Agustus 2009 yang saya nilai relevan, sebagai tambahan penjelasan dari hal-hal yang telah saya uraikan sebelumnya.

Presiden menyampaikan, bahwa tiga puluh tahun, lima puluh tahun ke depan, kita yakin Indonesia akan menjadi negara yang maju, bermartabat, dan sejahtera. Hal ini akan dapat diwujudkan jika Indonesia dapat memperkokoh tiga pilar kehidupan bernegara, yaitu: **kemandirian, daya saing dan peradaban yang unggul.**

Pilar kemandirian harus dijaga dan diperkuat, karena kemandirian adalah dasar dari kekuatan, ketahanan, dan kemampuan kita untuk terus maju sebagai bangsa. Indonesia tidak boleh ketergantungan kepada negara lain, bahkan kepada dunia. Makin ke depan, dengan sumberdaya dan kekuatan budaya yang kita miliki, kemandirian sebagai bangsa perlu terus kita tingkatkan.

Pilar daya saing yang makin tinggi yang harus dimiliki. Pada era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan tantangan ini, bangsa yang menang dan unggul adalah bangsa yang produktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang, serta berani menghadapi perubahan.

Dan, pilar ketiga, Indonesia harus mampu membangun dan memiliki **peradaban bangsa yang unggul dan mulia.** Itulah sebabnya, bangsa Indonesia perlu terus mempertahankan nilai, jati diri dan karakter bangsa kita yang luhur dan terhormat. Kita perlu terus meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih. Kita terus membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan dan kerukunan bangsa, serta memelihara kelestarian alam.

Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, kita dituntut untuk selalu mengedepankan cara-cara yang damai, beradab dan demokratis, sebagai ciri masyarakat madani, bukan dengan cara-cara kekerasan dan mengabaikan pranata sosial dan pranata hukum. Untuk itu, bangsa Indonesia **memerlukan pikiran-pikiran besar, serta karya-karya bangsa yang besar pula.**

Sementara, dalam menatap masa depan, adalah suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk terus membangun budaya unggul (*culture of excellence*) dan peradaban yang mulia. Dari hal inilah dikembangkan karakter, semangat, dan keuletan bangsa kita, menuju pembentukan masyarakat madani.

Hadirin yang berbahagia,

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini, dengan banyak keterbatasan yang saya miliki. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi segala upaya perubahan menuju masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur, berketuhanan yang maha esa.

Dengan membaca "**alhamdulillahirobil'alamin**" *Asia Pacific Interfaith Youth Meeting*, saya nyatakan **ditutup**. Sekian, terima kasih.

***Wallahul Muwafiq Illa Aqwamiththariq,
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh.***

Jakarta, 13 Oktober 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. H. Marzuki Alie